Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat
Volume 4, Nomor 4, Agustus 2026
e-ISSN: 3031-4380; p-ISSN: 3031-6448; Hal. 10-21
DOI: https://doi.org/10.61132/mengabdi.v4i4.2495
Tersedia: https://journal.areai.or.id/index.php/MENGABDI

Optimalisasi Tata Kelola BUMDes Sanrobone melalui Digitalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Pemetaan Potensi

Optimizing the Governance of BUMDes Sanrobone through Financial Information System Digitalization and Village Potential Mapping

Muhammad Tafsir[1*], Nurlaely Razak[2], Sahidah[3], Hardiani[4], Chaerunnisa Rumianti[5], Khaeril[6], Muh. Rusli Junaid[7]
[1-7]Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, Indonesia

**Penulis Korespondensi: muhammad.tafsir@stiem-bongaya.ac.id*

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 23 Mei 2026;
Revisi: 12 Juli 2026;
Diterima: 05 Agustus 2026;
Terbit: 24 Agustus 2026

Keywords: *BUMDes; Coastal Area; Financial Digitalization; Sanrobone Takalar; Village Potential Mapping.*

Abstract. *Village-Owned Enterprises (BUMDes) in coastal regions frequently encounter challenges regarding transparent financial governance and non-data-driven business unit selection. This community service activity aims to optimize the governance of BUMDes Sanrobone, Takalar Regency, through the digitalization of financial information systems and village economic potential mapping. The activity was conducted on May 5, 2026, at the Sanrobone Village Office Hall, involving 25 participants comprising BUMDes management, village officials, and local coastal MSME actors. The implementation method utilized a Participatory Action Research (PAR) approach across three stages: preparation, implementation (training and FGD), and evaluation. The intervention results demonstrated a significant increase in participants' capacity regarding digital accounting management, where the average pre-test score of 42.60 increased to 84.80 in the post-test, achieving an N-Gain score of 0.73 (high category). This program successfully produced outputs including a Digital Financial Report, Financial SOPs, and a Village Potential Map Document recommending the development of a marine product aggregator business unit and the Sanrobone Fort edutourism management unit. Digitalization and data-driven asset mapping are proven to enhance accountability and provide a sustainable strategic business direction for BUMDes.*

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah pesisir sering kali menghadapi kendala keterbatasan tata kelola keuangan yang transparan serta penetapan unit usaha yang belum berbasis data potensi lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengoptimalisasi tata kelola BUMDes Sanrobone, Kabupaten Takalar, melalui digitalisasi sistem informasi keuangan dan pemetaan potensi ekonomi desa. Kegiatan dilaksanakan pada 5 Mei 2026 di Aula Kantor Desa Sanrobone dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes, aparatur desa, dan pelaku UMKM pesisir. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui tiga tahapan: preparation, implementation (pelatihan dan FGD), dan evaluation. Hasil intervensi menunjukkan peningkatan kapasitas peserta yang signifikan dalam pengelolaan akuntansi digital, di mana nilai rata-rata *pre-test* sebesar 42,60 meningkat menjadi 84,80 pada *post-test* dengan nilai N-Gain sebesar 0,73 (kategori tinggi). Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa Laporan Keuangan Digital BUMDes, Dokumen SOP Keuangan, serta Dokumen Peta Potensi Desa yang merekomendasikan pengembangan unit usaha penampung hasil laut dan pengelola eduwisata Benteng Sanrobone. Digitalisasi dan pemetaan potensi berbasis data terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas serta memberikan arah pengembangan bisnis BUMDes yang berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes; Digitalisasi Keuangan; Pemetaan Potensi Desa; Pesisir; Sanrobone Takalar.

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Takalar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 74 kilometer dengan potensi sumber daya pesisir, perikanan, dan agraris yang sangat melimpah. Salah satu wilayah yang memiliki posisi strategis di Kabupaten Takalar adalah Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone. Secara geografis dan historis, Desa Sanrobone memiliki keunggulan komparatif yang unik. Selain ditopang oleh sektor perikanan tangkap, budidaya rumput laut, dan pertanian, desa ini juga memiliki warisan sejarah cagar budaya Situs Benteng Sanrobone yang berpotensi besar dikembangkan menjadi destinasi eduwisata berbasis sejarah dan pesisir. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara tegas menempatkan BUMDes sebagai pilar utama penggerak ekonomi desa dan instrumen kemandirian fiskal lokal. BUMDes didirikan dengan tujuan mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan masyarakat, serta basis sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Syahza et al., 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes di berbagai daerah pesisir, termasuk di Kabupaten Takalar, sering kali belum menunjukkan kinerja operasional dan finansial yang optimal.

Berdasarkan data profil tata kelola BUMDes di Indonesia, sebagian besar BUMDes masih berada pada kategori 'Perintis' dan 'Pemula' dengan tingkat keberlanjutan bisnis yang relatif rendah (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2022). Kondisi ini juga terpotret pada BUMDes Sanrobone di Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pengurus BUMDes serta pemerintah Desa Sanrobone, diidentifikasi dua permasalahan krusial yang menjadi hambatan utama pertumbuhan BUMDes Sanrobone, yaitu: (1) Lemahnya Tata Kelola dan Pembukuan Keuangan yang Masih Konvensional, serta (2) Belum Adanya Pemetaan Potensi Desa Berbasis Data (*Evidence-Based Asset Mapping*). Dari aspek tata kelola dan pencatatan keuangan, BUMDes Sanrobone masih mengandalkan sistem pencatatan manual berbasis buku kas sederhana. Pengelola BUMDes belum menerapkan sistem akuntansi standar maupun aplikasi keuangan digital yang akuntabel. Hal ini mengakibatkan lambatnya penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan Arus Kas), tingginya risiko kesalahan pencatatan (*human error*), serta minimnya transparansi pelaporan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah desa selaku pemegang saham utama. Penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2022) menegaskan bahwa kegagalan BUMDes dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya sebagian besar dipicu oleh transparansi yang rendah dan pengelolaan keuangan yang tidak tertata secara profesional. Minimnya akuntabilitas keuangan juga berdampak pada rendahnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap program unit usaha BUMDes.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai aplikasi pencatatan keuangan akuntansi berbasis awan (*cloud-based*) dan aplikasi seluler yang dirancang khusus untuk entitas mikro dan BUMDes (seperti SIAPIK dari Bank Indonesia atau sistem akuntansi BUMDes berbasis spreadsheet terintegrasi). Digitalisasi sistem informasi keuangan merupakan keniscayaan bagi BUMDes untuk meningkatkan presisi, efisiensi waktu, dan keterbukaan publik (Firmansyah & Nurbaity, 2023). Tanpa adanya adopsi teknologi digital dalam pengelolaan akuntansi, BUMDes Sanrobone akan terus mengalami kendala dalam mengakses kemitraan modal pihak ketiga maupun lembaga perbankan resmi. Permasalahan krusial kedua terletak pada analisis unit usaha dan pemetaan potensi desa. Selama ini, penetapan unit usaha BUMDes Sanrobone cenderung bersifat intuitif dan imitasi (meniru BUMDes dari daerah lain) tanpa didasari oleh analisis rantai nilai (*value chain analysis*) dan pemetaan potensi lokal secara komprehensif. Desa Sanrobone memiliki diversifikasi potensi yang sangat kaya, mulai dari komoditas perikanan laut, budidaya rumput laut, produk olahan pangan pesisir oleh kelompok perempuan, hingga potensi potensi eduwisata benteng bersejarah. Namun, komoditas dan potensi tersebut belum dipetakan secara spasial maupun ekonomis ke dalam data-drive map yang sistematis. Menurut penelitian Susanto dan Wibowo (2023), kegagalan unit usaha BUMDes sering terjadi akibat ketidaksesuaian (*mismatch*) antara komoditas unit usaha yang dipilih dengan ketersediaan rantai pasok dan kebutuhan pasar lokal.

Tanpa adanya pemetaan potensi desa yang terstruktur, BUMDes Sanrobone kesulitan mengidentifikasi unit usaha unggulan (*core business*) yang memiliki daya saing tinggi dan berisiko rendah. Pemetaan potensi desa berbasis data tidak hanya berfungsi menginventarisasi aset ekonomi, tetapi juga memetakan jaringan pemangku kepentingan (*stakeholders*), kapasitas SDM lokal, serta preferensi pasar sasaran. Integrasi antara sistem informasi keuangan yang akuntabel dan pemetaan potensi desa berbasis data merupakan formulasi strategis untuk mentransformasi BUMDes Sanrobone dari BUMDes kategori perintis menjadi BUMDes yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan. Guna mengatasi persoalan mitra tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan program pendampingan dan implementasi teknologi tepat guna melalui "Optimalisasi Tata Kelola BUMDes Sanrobone Melalui Digitalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Pemetaan Potensi Desa". Program intervensi ini dirancang dengan pendekatan berpartisipasi (*Participatory Action Research*) yang melibatkan pengurus BUMDes, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM lokal di Desa Sanrobone.

Solusi terintegrasi yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini meliputi:

a. Pelatihan dan Pendampingan Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital: Mengimplementasikan software/aplikasi keuangan digital yang disesuaikan dengan karakteristik unit usaha BUMDes Sanrobone guna menghasilkan laporan keuangan standar akuntansi secara real-time, akurat, dan transparan.
b. Penyusunan Peta Potensi Ekonomi dan Aset Desa Sanrobone: Melakukan riset aksi participatif untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memetakan komoditas unggulan pesisir serta potensi eduwisata sejarah menjadi matriks kelayakan unit bisnis BUMDes.
c. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola BUMDes: Merumuskan dokumen tata kelola kelembagaan dan mekanisme pelaporan berkala untuk menjamin transparansi dan keberlanjutan (*sustainability*) organisasi BUMDes Sanrobone.
d. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan pengurus BUMDes Sanrobone mengalami peningkatan kapasitas (*capacity building*) dalam mengelola keuangan secara transparan dan berbasis digital. Selain itu, dokumen peta potensi desa yang dihasilkan akan menjadi kompas strategis bagi BUMDes dan Pemerintah Desa Sanrobone dalam menetapkan arah investasi dan pengembangan unit usaha masa depan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan secara terstruktur dengan puncak intervensi berupa pelatihan dan pendampingan tatap muka yang diselenggarakan pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini melibatkan 25 orang peserta yang terdiri dari: Pengurus inti BUMDes Sanrobone (5 orang), Aparatur Pemerintah Desa Sanrobone (5 orang), Perwakilan Kelompok Usaha/UMKM Pesisir & Pengelola Wisata Lokal (10 orang), serta Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Karang Taruna (5 orang).

Tahap Persiapan (*Preparation Phase*)

Tahap persiapan bertujuan untuk membangun komitmen bersama, menyelaraskan kebutuhan mitra, serta menyiapkan instrumen teknis kegiatan. Tahap ini mencakup tiga langkah utama:

a. Observasi Lapangan dan Analisis Kebutuhan (*Need Assessment*): Tim pengabdi melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala Desa dan Direktur BUMDes Sanrobone untuk memetakan kendala spesifik dalam pencatatan keuangan dan tata kelola unit usaha.
b. Penyusunan Modul dan Instrumen Teknis: Penyusunan Modul Pelatihan Pencatatan Keuangan Digital BUMDes berbasis aplikasi (cloud/spreadsheet terintegrasi).
c. Pembuatan instrumen *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuesioner pemetaan potensi desa (sektor perikanan, rumput laut, dan eduwisata Benteng Sanrobone).
d. Penyusunan soal tes pemahaman awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*) untuk mengukur tingkat peningkatan kapasitas pengurus BUMDes.
e. Koordinasi Kelembagaan dan Perizinan: Pengurusan izin kegiatan PkM dengan Pemerintah Desa Sanrobone serta penyusunan jadwal pendampingan bersama pengurus BUMDes.

Tahap Pelaksanaan (*Implementation Phase*)

Tahap pelaksanaan difokuskan pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), pelatihan praktis, dan pendampingan intensif. Pelaksanaan dibagi menjadi tiga pilar intervensi:

Pelatihan dan Pendampingan Digitalisasi Keuangan BUMDes.

a. Sesi Workshop Teoritis & Praktis: Pelatihan pencatatan transaksi kas masuk/keluar, penyusunan jurnal umum, hingga pembuatan Laporan Keuangan (Laba Rugi dan Neraca) menggunakan Sistem Informasi Keuangan Digital.
b. Pendampingan *One-on-One*: Tim pendamping melakukan asistensi migrasi data keuangan BUMDes dari sistem pencatatan manual berbasis kertas ke dalam sistem digital secara real-time.
c. Penyusunan SOP Keuangan: Merumuskan *Standard Operating Procedure* (SOP) pencatatan dan pelaporan keuangan berkala BUMDes Sanrobone.

Pemetaan Potensi Desa Berbasis Data (Asset-Based Mapping)

a. FGD Pemetaan Potensi: Melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, kelompok nelayan, dan kelompok wanita tani/UMKM untuk mengidentifikasi komoditas unggulan dan potensi eduwisata sejarah Benteng Sanrobone.
b. Survei dan Verifikasi Data Lapangan: Tim bersama mitra melakukan ground-checking rantai pasok (*value chain*) komoditas lokal dan kesiapan infrastruktur pendukung.
c. Digitalisasi Peta Potensi: Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi Desa dan Matriks Kelayakan Unit Usaha BUMDes Sanrobone.

Penyerahan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penyerahan 1 unit perangkat keras (laptop/tablet) dan lisensi aplikasi/template sistem keuangan digital BUMDes yang siap pakai.

Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan (*Evaluation Phase*)

Tahap evaluasi dirancang secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan program, efektivitas intervensi, serta menyusun rencana keberlanjutan (*sustainability plan*).

a. Evaluasi Peningkatan Kapasitas SDM (Kuantitatif): Mengukur tingkat pemahaman pengurus BUMDes sebelum dan sesudah pelatihan menggunakan analisis N-Gain *Score* dari hasil *pre-test* dan *post-test*.
b. Evaluasi Kinerja Sistem Keuangan (Kualitatif & Kelengkapan Dokumen): Verifikasi ketersediaan Laporan Keuangan Digital BUMDes Sanrobone yang valid, akurat, dan siap dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Desa (Musdes).
c. Evaluasi Ketersediaan Dokumen Pemetaan Potensi: Penilaian kelengkapan Dokumen Peta Potensi Desa sebagai dasar acuan Rencana Kerja Usaha (RKU) BUMDes periode berikutnya.
d. Penyusunan Rencana Keberlanjutan Program (*Exit Strategy*): Pembentukan *Person in Charge* (PIC) internal BUMDes dan penyediaan kanal konsultasi online pasca-program untuk memastikan sistem keuangan digital tetap berjalan secara mandiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk "Optimalisasi Tata Kelola BUMDes Sanrobone Melalui Digitalisasi Sistem Informasi Keuangan dan Pemetaan Potensi Desa" telah dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Sanrobone, Kabupaten Takalar. Kegiatan ini dihadiri secara penuh oleh 25 orang peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes Sanrobone, aparatur pemerintah desa, perwakilan UMKM pesisir, serta tokoh masyarakat.



Gambar 1. Peserta dan Narasumber Kegiatan.

Pelaksanaan program secara terstruktur menghasilkan pencapaian nyata pada dua fokus utama intervensi, yaitu peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan digital dan pemetaan potensi ekonomi desa.

a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Digital BUMDes

Sebelum intervensi dilakukan, analisis situasi awal menunjukkan bahwa pengurus BUMDes Sanrobone masih mencatat transaksi secara konvensional dalam buku kas harian tanpa mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Hal ini berakibat pada ketidakakuratan data kas dan keterlambatan penyusunan laporan keuangan tahunan.

Untuk mengukur efektivitas pelatihan pencatatan keuangan digital yang diselenggarakan pada 5 Mei 2026, dilakukan analisis komparatif nilai *pre-test* dan *post-test* terhadap 25 peserta sasaran. Pengukuran mencakup pemahaman akuntansi dasar, alur pencatatan transaksi kas masuk/keluar, penyusunan jurnal umum, hingga pengoperasian aplikasi sistem informasi keuangan digital.

b. Pemetaan Potensi Ekonomi dan Aset Desa Sanrobone

Melalui sesi *Focus Group Discussion* (FGD) dan pemetaan partisipatif (*Asset-Based Community Development*) yang melibatkan 25 peserta, tim pengabdi bersama masyarakat berhasil menginventarisasi dan memetakan aset strategis Desa Sanrobone ke dalam tiga kluster potensi utama:

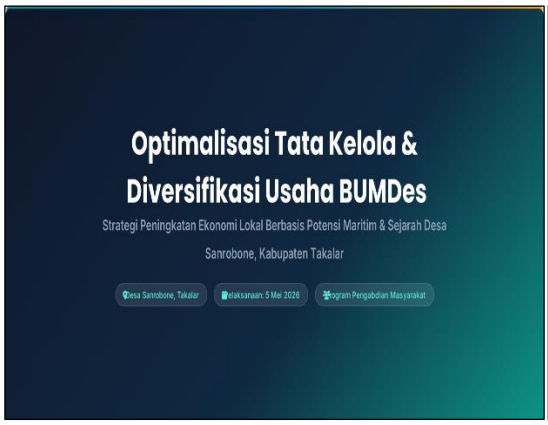
Tabel 1. Analisis Peningkatan Kapasitas Peserta.

Kluster Potensi	Aset & Komoditas Utama	Kendala Saat Ini	Rekomendasi Unit Usaha BUMDes Sanrobone
Sektor Perikanan & Kelautan	Hasil tangkap ikan segar, budidaya rumput laut, dan tambak	Rantai pasok dikuasai tengkulak; harga fluktuatif	Unit Usaha Penampung & Pemasaran Hasil Laut (BUMDes sebagai *off-taker*)
Sektor Wisata & Budaya	Situs Sejarah Benteng Sanrobone dan kawasan pesisir	Tata kelola destinasi belum terintegrasi	Unit Usaha Pengelola Eduwisata & Jasa Pariwisata (Kemitraan Pokdarwis)
Sektor UMKM Pesisir	Olahan ikan (kerupuk/abon) dan kerajinan tangan oleh kelompok perempuan	Kemasan dan akses pasar luar daerah terbatas	Unit Usaha Rumah Kemasan & Pusat Oleh-Oleh Desa

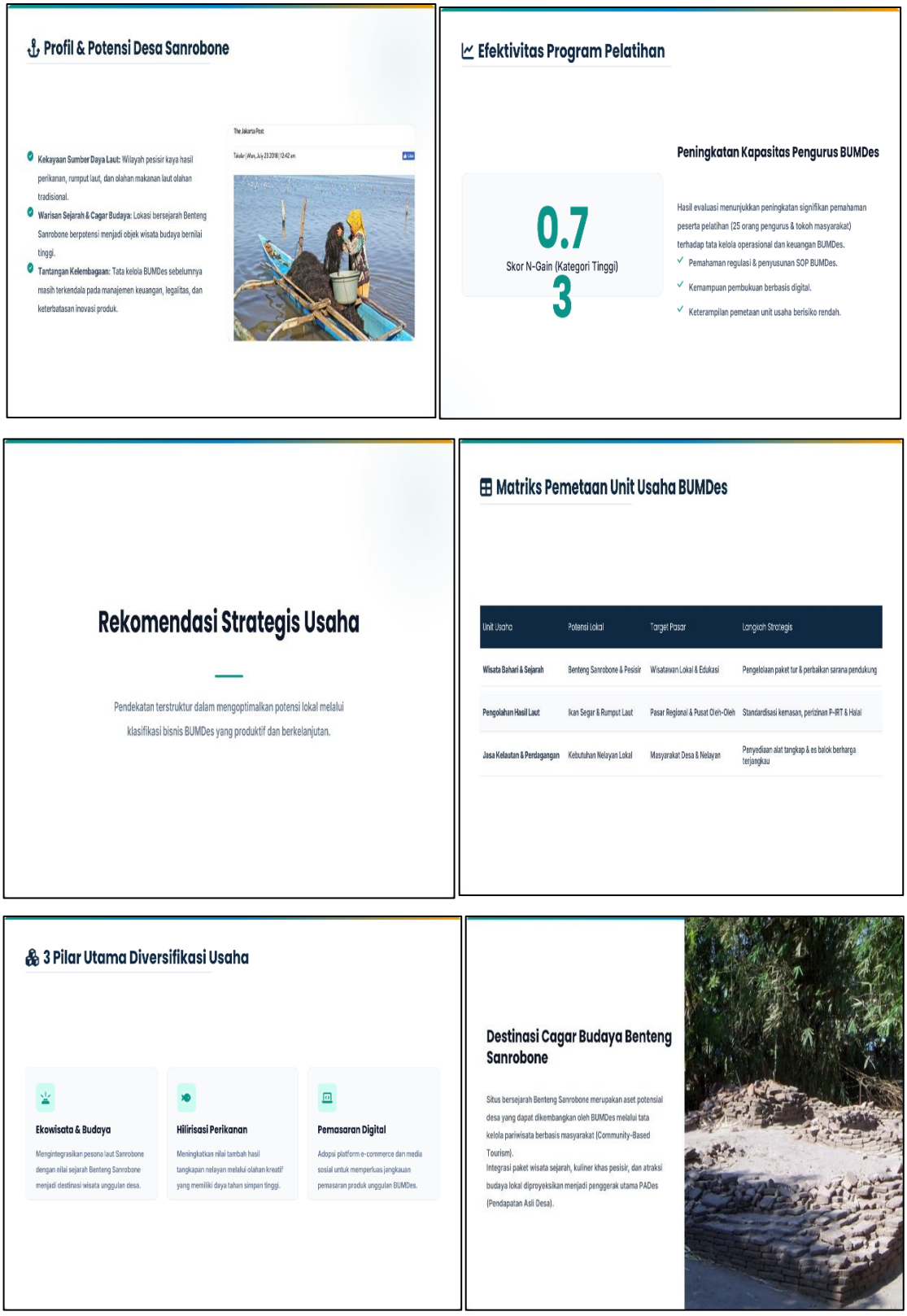
Pembahasan



Gambar 2. Pemaparan Dari Narasumber.







Gambar 3. Slide presentasi dari Narasumber.

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pendampingan teknologi keuangan dan pemetaan potensi desa memberikan dampak ganda (*double-impact*) bagi penguatan BUMDes di wilayah pesisir. Peningkatan nilai N-Gain sebesar 0,73 menegaskan bahwa kendala utama BUMDes di wilayah pedesaan selama ini bukanlah ketidakmampuan pengurus, melainkan minimnya akses terhadap pelatihan teknologi yang bersifat aplikatif dan berbasis pendampingan langsung (*mentorship*). Hal ini sejalan dengan temuan Firmansyah dan Nurbaity (2023), yang menyatakan bahwa digitalisasi akuntansi sederhana terbukti mampu memangkas waktu penyusunan laporan keuangan hingga 60% sekaligus menekan risiko *human error*. Transparansi keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi digital ini secara langsung meningkatkan kepercayaan (*trust*) pemerintah desa dan masyarakat terhadap transparansi BUMDes. Di sisi lain, pemetaan potensi berbasis *Asset-Based Community Development* (ABCD) terbukti memberikan arah pengembangan bisnis yang terukur bagi BUMDes Sanrobone. Sebagaimana ditegaskan oleh Susanto dan Wibowo (2023), BUMDes yang membangun bisnis berdasarkan potensi rantai nilai lokal memiliki tingkat keberlanjutan (*sustainability*) yang jauh lebih tinggi dibandingkan BUMDes yang mengoperasikan unit usaha imitatif. Dengan menempatkan BUMDes sebagai *off-taker* hasil perikanan dan pengelola eduwisata Benteng Sanrobone, BUMDes tidak hanya mengejar profitabilitas (*revenue generation*), tetapi juga menjalankan fungsi sosial-ekonomi dalam membebaskan nelayan lokal dari ketergantungan pada tengkulak.



Gambar 4. Antusiasme para peserta.

Implementasi penyerahan paket teknologi tepat guna berupa sistem informasi keuangan digital pada tanggal 5 Mei 2026 menjadi fondasi utama bagi BUMDes Sanrobone untuk bertransformasi dari BUMDes kategori perintis menuju BUMDes mandiri di Kabupaten Takalar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan di Desa Sanrobone, Kabupaten Takalar pada tanggal 5 Mei 2026 terbukti efektif dalam mentransformasi tata kelola BUMDes Sanrobone dari sistem konvensional menuju sistem digital yang transparan dan berbasis data. Intervensi pelatihan dan pendampingan aplikasi keuangan digital terbukti meningkatkan kapasitas 25 orang peserta secara signifikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata *pre-test* sebesar 42,60 menjadi 84,80 pada *post-test* dengan skor N-Gain sebesar 0,73 (kategori tinggi/efektif). Selain peningkatan literasi akuntansi, luaran konkret program ini menghasilkan 1 Set Laporan Keuangan Digital BUMDes, SOP Keuangan Resmi, serta Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Desa yang menetapkan dua pilar unit usaha unggulan, yaitu pemberdayaan rantai pasok sektor perikanan/rumput laut dan pengintegrasian eduwisata cagar budaya Benteng Sanrobone.

Saran

Bagi Pengurus BUMDes & Pemerintah Desa Sanrobone: Diharapkan konsistensi dalam mengunggah (*input*) data transaksi harian secara *real-time* ke dalam sistem keuangan digital serta menjadikan Dokumen Pemetaan Potensi Desa sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) tahunan. Bagi Tim Pengabdi Selanjutnya: Perlu dilakukan pendampingan lanjutan mengenai strategi digital marketing, perluasan kemitraan pasar (*off-taker*), dan fasilitasi legalitas produk UMKM lokal agar unit usaha BUMDes dapat beroperasi secara komersial dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Firmansyah, A., & Nurbaity, A. (2023). Digitalisasi sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan BUMDes. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi Desa*, 5(1), 45–58.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Laporan kinerja tata kelola dan pemeringkatan BUMDes nasional*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara.

Putra, R. A., Wijaya, K., & Lestari, S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes di wilayah pesisir. *Jurnal Ilmiah Tata Kelola Keuangan Desa*, 4(2), 112–125.

Susanto, H., & Wibowo, A. (2023). Strategi pemetaan potensi desa berbasis *asset-based community development* untuk keberlanjutan unit usaha BUMDes. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 8(3), 201–215.

Syahza, A., Nasrul, B., & Irianti, M. (2021). Empowering the village economy through the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in coastal regions. *Journal of Rural and Community Development*, 16(2), 89–104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara.